Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025

Lampiran XIII



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas limpahan rahmat serta ridho-Nya kami telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah dokumen perencanaan yang berisi target capaian dan indikator kinerja sebagai acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan dalam rangka mewujudkan suatu Pemerintahan yang akuntabel.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharap saran dan tanggapan yang positif untuk kesempurnaan penyusunan ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Salatiga, 25 September 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA

YAYAT NURHAYAT, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740416 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 11

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah..... 18

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 21

2.4 Review terhadap RKPD..... 26

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 42

2.6

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 44

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah..... 44

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 45

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 48

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 56

BAB V : PENUTUP 74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 ayat 1 huruf e disebutkan bahwa bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sedangkan pada pasal 255 ayat 1 disebutkan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 juga memperhatikan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Selanjutnya, Renja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029, mempertimbangkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan, Pemutakhiran, dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Jangka Panjang Daerah, dan Jangka Menengah Daerah, serta Jangka Pendek Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penvelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang RKPD Kota Salatiga Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang sangat penting, menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Daerah. Secara makro maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja ini adalah sebagai beriku :

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Salatiga dengan dukungan Anggaran dari pemerintah Kota Salatiga, dengan harapan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat Kota Salatiga.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk menjabarkan Rencana Kerja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 dan sebagai pedoman kerja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026.
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026.

3. Sebagai alat kontrol, evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Tabel 1 (Tabel T-C.29) yang disajikan disesuaikan dengan PD masing-masing dengan format tabel terlampir.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap

Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan Tabel 2 (Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan PD yang disesuaikan menurut PD masing-masing dengan format tabel terlampir.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD,

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Menyajikan Tabel 3 (Tabel T-C.31) tentang review terhadap Rancangan Awal RKPD pada tahun rencana dengan format terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

Menyajikan Tabel 4 dengan format terlampir (Tabel T-C.3

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA PD.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

3.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal:

3.1.1.1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

3.1.1.2. Pencapaian SDGs,

3.1.1.3. Pengentasan kemiskinan

3.1.1.4. Pencapaian NSPK dan SPM,

3.1.1.5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

3.1.1.6. dsb.

3.1.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:

3.1.2.1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan,

3.1.2.2. Sifat penyebaran lokasi program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),

3.1.2.3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3.1.3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah

kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RENSTRA, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

3.1.4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33 atau Tabel Rumusan Rencana Program, Jumlah Kegiatan Dan Sub Kegiatan PD Tahun Rencana dan Perkiraan Maju yang dicetak dari hasil penginputan pada aplikasi web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alamat: **https://sipd-ri.kemendagri.go.id/**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiata serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, sebagaimana Tabel VI.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam pelaksanaannya, dokumen perencanaan dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan, pelaksanaan rencana dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai;
d. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
e. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b. Memperhatikan keberlanjutan *(sustainable development)* untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2024 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

TABEL T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun (tahun berjalan/n-1)

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program , kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	88	87.09	98.96	88	87.09	113,6363636
01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja	7	7	7	7	100	7	7	300
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Angka Kredit	0	0	0	0	0	1	0	0
01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	200
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	48	47	50	47	94	50	146	251,7241379
01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran	12	12	12	12	100	12	36	300
01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	300
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi kendaraan dinas	7	7	7	7	100	7	16	266,6666667
01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ekstra fooding PNS dan THL	145	141	145	140	96.55	145	281	232,4137931
01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	0	140	145	140	96.55	140	181	96.55
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai	2	1	1	1	100	0	1	100
01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100

	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Pembelian komponen listrik dan penerangan kantor	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian perabot kantor, alat dan bahan kebersihan	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian ATK, kertas dan cover	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembelian barang cetakan dan fotokopi	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	langgaran koran	2	2	2	2	100	2	2	100
	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	pembelian makan minum tamu	12	12	12	12	100	12	12	100
	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas luar daerah dan snack rapa	12	12	12	12	100	12	12	100
	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	100	100	100	100	100	100	100
	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembelian kendaran dinas jabatan	0		0			0	0	0
	01	2	07	02	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembelian kendaran dinas operasional	2		0			0	0	0
	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Pembelian kursi dan meja kerja	10		0			0	0	0
	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian komputer, printer, HT, RIG	0	1	1	1	1	1	1	100
	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Meterai dan perangko	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	3	3	3	3	100	3	3	100
	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya reapeter dan chainsaw	1	1	1	1	100	1	1	100
	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium dan iuran BPJS bagi honorer dan THL	12	14	12	14	116.66	14	14	116.66
	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	32	32	32	32	100	32	32	100
	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	13	13	13	13	100	13	13	100
	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharan kursi dan meja kantor	0	0	0	0		0	0	0
	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan komputer, printer, AC, HT, RIG, Repeater	63	63	63	63	100	63	63	100
	01	2	09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor bertingkat	1	1	1	1	100	1	1	100
	02				PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	operasi PKL, PGOT, pengamanan hari besar, pengamanan INATARU, patroli pengendalian pelanggaran trantibum, penertiban APK, pengamanan Pemilu,	10	10	10	10	100	10	10	100

						patroli yustisi pencegahan covid(ada di th 2021 dan 2022)								
	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, latsar linmas, lomba linmas	8	8	8	8	100	8	8	100
	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh sosialisasi PERDA	4	4	4	4	100	4	4	100
	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	8	8	8	8	100	8	8	100
	02	2	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	2	2	2	2	100	2	2	100
	02	2			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terbentuknya Sekretariat PPNS	2	0	0	0	0	0	0	0
	02	2			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rapat tim sekretariat PPNS dan Pembinaan PPNS	2	0	0	0	0	0	0	0
	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80	75	70	75	107.14	75	75	107.14
	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	15	15	15	15	100	15	15	15
	04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (respon time) daerah layanan wilyah kebakaran	30	30	30	30	100	30	30	100
	04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	50	50	50	50	100	50	50	100
	04	2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pembelian perlengkapan petugas pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran	5	0	0	0	0	5	0	0
	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas damka	1	1	1	1	100	1	1	100
	04	2	01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	0	0	0	0	0	0	0
	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	2	2	2	100	2	2	100
	04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	2	2	2	100	2	2	100

Dalam tahun anggaran 2024 Satpol PP Kota Salatiga telah melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2024. Dari 3 program dan 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
      b. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
   b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
   c. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan

2. Kegiatan Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
   b. Sub Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati/Wali Kota
   c. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
   1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penaganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota
      a. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kab/Kota
      b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
      c. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
   2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
      a. Sub Kegiatan Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran

Hasil evaluasi terhadap Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja tercapai, dimana realisasi pencapaian target kinerja fisik sebesar 97,23% dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan adalah 86,80% yaitu dari anggaran sebesar 14.601.148.189,00 realisasinya adalah sebesar Rp. 12.674.472.103,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran Rp. 7.199.846.225,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.869.446.262,00 (81,52%) dan Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran Rp. 7.002.895.568,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.444.196.841,00 (92,02 %).
2. Belanja Modal Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu anggaran Rp. 398.406.396,00 dan realisasi mencapai Rp. 360.829.000,00 (90,57%).

Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antaralain:

1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan triwulan.
4. Tersedia Tim yang kompenten dalam mendukung kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian SPM dilihat dari indikator dan nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara Nasional tidak sepenuhnya tercapai hal tersebut disebabkan oleh beberapa aspek antara lain; jumlah personil, keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi wilayah, dsb. Jumlah Personil Satpol PP Kota Salatiga pada saat tahun 2024 berjumlah 141 personil (46 orang ASN dan 94 orang THL serta 1 orang petugas kebersihan) yang terbagi dalam 2 bagian yakni yang bertugas dalam pengamanan aset terdiri dari personil Satpol PP sendiri maupun yang bertugas menjalankan fungsi Pemadam Kebakaran.

Dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 disebutkan bahwa bagi Pemerintah Kab/Kota yang memiliki skor 400 maka jumlah personil antara 150 s/d 250 personil Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan untuk pengadaan PNS merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga perlu kebijakan untuk perekrutan tenaga harian lepas guna membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Maka untuk mencapai indikator dan capaian dalam kegiatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga sesuai dengan arah kebijakan pimpinan melaksanakan kegiatan tersebut secara menyeluruh kemudian difokuskan pada lingkup yang lebih kecil. Misalnya operasi IMB, HO, Reklame, Pajak Restoran dan PKL masuk dalam ranah penegak perda termasuk operasi non yustisi. Sedangkan khusus untuk patroli masuk dalam ranah ketentraman dan ketertiban umum.

Target yang dicapai atau direalisasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2024 dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.

No.	Program/Kegiatan	Target Pencapaian		Anggaran	
		Target	Realisasi	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100%	1.853.166.000,-	1.725.839.950,-
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%	210.302.000,-	169.285.500,-
3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah kebakaran	15 menit	7.04 menit	195.000.000.-	163.220.600,-

Kinerja pelayanan Satpol PP Kota Salatiga yang dianalisis merupakan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut analisis pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Salatiga disajikan pada tabel di bawah ini dan Renstra Satpol PP tahun 2025-2029:

TABEL T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		CatatanAnalisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN TRANTIBUM	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	menit	15	15	15	15	4.55	7.04	-	-	*Respon Time 15 menit* Penanganan Kebakaran dalam daerah Salatiga

Dari Tabel T.C.30 dapat dilihat ada 2 Indikator Kinerja, untuk pelayanan ketentraman dan tertiban umum telah mencapai 100% karena semua aduan masuk telah ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk pelayanan kebakaran dalam Kota Salatiga telah sesuai dengan target karena rata-rata petugas telah sampai lokasi sebelum 15 menit dari petugas menerima laporan kebakaran.

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Satpol PP mempunyai peran strategis dalam mengawal bergulirnya era globalisasi, reformasi dan era otonomi daerah dewasa ini yang menciptakan degradasi kehidupan masyarakat senantiasa berubah dengan cepat, banyak perubahan terhadap norma perilaku yang mengalami diskresi sosial, sehingga menuntut adanya peningkatan peran serta secara lebih optimal, konseptual dan prosedural terhadap penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satpol PP. Seiring dengan penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola berbagai sektor pembangunan guna kepentingan dan kesejahteraan di daerah. Implikasinya adalah makin penting dan strategisnya penyelenggaraan trantibum guna mendukung terciptanya kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi peranan Satpol PP untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah serta menciptakan trantibum dimaksudkan agar penyelenggaraan program-program pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai target sasaran yang dikehendaki. Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Adapun fungsi Satpol PP berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satpol PP; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Penentuan Isu-isu strategis didasarkan pada perkembangan situasi kondisi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah, peningkatan ketentraman dan ketertiban serta pelayanan pada masyarakat dapat dilihat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 sebagai berikut:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KHLS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kualitas pembangunan manusia yang tinggi	Fungsi Satpol PP belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan. Kewenangan regulasi belum optimal.	Perlunya peningkatan kualitas SDM	Distrubsi Teknologi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Penguatan kelembagaan Satpol PP sebagai aparat penegak perda yang tegas dan humanis. Pemanfaatan regulasi daerah untuk menciptakan iklim usaha dan ruang publik yang tertib serta berkeadilan.
	Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Potensi konflik sosial karena heterogenitas.	Perlunya peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Keuangan Internasional	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan partisipasi masyarakat (Linmas, komunitas, mahasiswa) dalam menjaga ketertiban. Edukasi sadar hukum dan budaya tertib untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang inklusif.
Potensi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Aktivitas ekonomi di ruang publik sering menimbulkan gangguan ketertiban (PKL tidak tertata, reklame tidak berizin, parkir liar).	Perlunya peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah	Urbanisasi Dunia	Geopolitik dan Geoekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Penataan ruang publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara tertib, aman, dan berkeadilan. Kolaborasi dengan pelaku usaha untuk menciptakan ruang usaha yang tertib.
	Wilayah padat berisiko tinggi kebakaran. Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kedaruratan masih terbatas.	Terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas air	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Penguatan sistem layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Salatiga, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Tantangan

Berikut ini beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menyongsong era keterbukaan dan era globalisasi guna terlaksananya pembangunan berskala Kedaerahan maupun nasional. Tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga adalah:

a. Adanya persaingan pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) berpengaruh pada meningkatnya usaha mandiri dan banyaknya perusahaan yang pailit sehingga akan terjadi gejolak ;
b. Banyaknya regulasi yang tumpah tindih berdampak pada kurangnya pemahaman dan penafsiran dari masyarakat yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mentaati peraturan yang ditetapkan ;
c. Kecenderungan Pelayanan kepada masyarakat dengan sistem iptek yang lebih canggih sehingga dituntut petugas yang handal dan berkualitas ;
d. Meningkatnya kasus-kasus kriminalitas disebabkan karena banyakya karyawan yang di PHK;

Beberapa tantangan diatas merupakan suatu kondisi yang harus dihadapi dan diperbaiki pada masa yang akan datang dan memperhatikan program dan kegiatan yang mendukung terselenggarannya pembangunan serta tujuan organisasi dapat terwujud.

Untuk mengatasi tantangan diatas maka sebagai organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja perlu menanggapi dengan peluang yang ada khususnya memanfaatkan Sumber Daya yang ada guna mendukung program/kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a. Mengoptimalkan potensi yang ada pada OPD baik dari Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mendukung kinerja OPD;
b. Memberdayakan warga masyarakat baik individu maupun masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. Menciptakan kondisi yang harmonis antar aparat keamanan, antar warga masyarakat dan antar instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
d. Melibatkan partisipasi warga masyarakat ikut serta dalam menciptakan keamanan lingkungan dengan memberdayakan lembaga masyarakat yang ada seperti Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Kader Siaga Trantib (KST).

2. Peluang

Peluang adalah bentuk positif dari suatu tantangan ataupun potensi positif yang dapat timbul karena adanya suatu ancaman keadaan. Hal-hal yang diidentifikasi sebagai peluang untuk Satpol PP sebagai berikut:

1. Salatiga sebagai kota transit pariwisata sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga;
2. Dukungan yang signifikan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD);
3. Kemitraan dengan TNI/Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM;
4. Dukungan dari stakeholder maupun masyarakat;
5. Ketersediaan fasilitas dan anggaran untuk melakukaan peningkatan Koordinasi dan kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi;
6. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan Kompetensi Aparatur dan adanya penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pemerintah atasan.

2.4 Review terhadap RKPD

RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah. RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 program dan 12 kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dalam Rencana Kerja Tahun 2026 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun yang berfokus pada pencapaian visi Kota Salatiga Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 3 program dan 12 kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Ranwal Renja Tahun 2026 :

Jumlah Program	:	3 Program
Jumlah Kegiatan	:	12 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	:	33 Sub Kegiatan
Pagu Indikatif	:	11.783.775.000,00

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian tahun 2026 sebesar 100 %.

Penetapan Indikator Kinerja
Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani : Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan oleh pemerintah daerah kota Salatiga : jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi di kota salatiga	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan di kota Salatiga : jumlah kejadian kebakaran	%	66.9	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja			Kondisi Kinerja Akhir
				2026	2027	2028	2029	2030
4.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Keseluruhan Waktu Respon Time / Jumlah Keseluruhan Kejadian	menit	15	15	15	15	15

TABEL T-C.31.

Review terhadap RKPD pada Tahun (rencana /n)

No	RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88**	**10.526.822.200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88**	**11.905.659.789**	
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**6.807.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah**	**100**	**6.807.000**	
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja	7	6.807.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja	7	6.807.000	
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol pp Kota Salatiga	Penilaian Angka Kredit	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol pp Kota Salatiga	Penilaian Angka Kredit			

B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**9.275.614.400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**10.568.932.789**	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol pp Kota Salatiga	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	48	6.347.436.964	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol pp Kota Salatiga	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	48	7.172.079.225	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol pp Kota Salatiga	Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran	12	2.928.177.436	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Satpol pp Kota Salatiga	Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran	12	3.396.853.564	
C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**35.400.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**42.000.000**	
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	Asuransi kendaraan dinas	6	35.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	Asuransi kendaraan dinas	6	42.000.000	
D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**329.876.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**340.680.000**	

a	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol pp Kota Salatiga	Ekstra fooding PNS dan THL	145	295.680.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Satpol pp Kota Salatiga	Ekstra fooding PNS dan THL	149	295.680.000	
b	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian Pakaian Dinas PNS dan Non PNS			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian Pakaian Dinas PNS dan Non PNS			
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol pp Kota Salatiga	Pendidikan dan pelatihan pegawai	2	34.196.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol pp Kota Salatiga	Pendidikan dan pelatihan pegawai (Capasity Building)	2	45.000.000	
E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**180.748.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**204.120.000**	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian komponen listrik dan penerangan kantor	1	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian komponen listrik dan penerangan kantor	1	5.000.000	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian perabot kantor, alat dan bahan kebersihan	1	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian perabot kantor, alat dan bahan kebersihan	1	15.000.000	

c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian ATK, kertas dan cover	1	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian ATK, kertas dan cover	1	30.000.000	
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian barang cetakan dan fotokopi	1	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian barang cetakan dan fotokopi	1	15.000.000	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Satpol pp Kota Salatiga	langgaran koran	2	2.280.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Satpol pp Kota Salatiga	langgaran koran	2	3.120.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian makan minum tamu	12	24.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian makan minum tamu	12	30.000.000	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	perjalanan dinas luar daerah dan snack rapa	12	89.468.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol pp Kota Salatiga	perjalanan dinas luar daerah dan snack rapa	12	100.000.000	
F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**0**	
a	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian kendaran dinas jabatan	0	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian kendaran dinas jabatan	0		

b	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian kendaran dinas operasional		-	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp Kota Salatiga	pembelian kendaran dinas operasional			
c	Pengadaan Mebel	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian kursi dan meja kerja	10	-	Pengadaan Mebel	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian kursi dan meja kerja	10		
d	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian komputer, printer, HT, RIG	20	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian komputer, printer, HT, RIG	20	0	
G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**65.304.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**67.000.000**	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian Meterai dan perangko	2	3.304.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian Meterai dan perangko	2	5.000.000	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp Kota Salatiga	pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	3	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol pp Kota Salatiga	pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	3	50.000.000	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Terpeliharanya reapeter dan chainsaw	0	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Satpol pp Kota Salatiga	Terpeliharanya reapeter dan chainsaw	1	12.000.000	

d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	honorarium dan iuran BPJS bagi honorer dan THL	0	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol pp Kota Salatiga	honorarium dan iuran BPJS bagi honorer dan THL	0	0	
H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**633.072.800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**676.120.000**	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	32	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	32	150.000.000	
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	17	411.143.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	17	450.000.000	
c	Pemeliharaan Mebel	Satpol pp Kota Salatiga	Pemeliharan kursi dan meja kantor	10		Pemeliharaan Mebel	Satpol pp Kota Salatiga	Pemeliharan kursi dan meja kantor	10	0	

d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan komputer, printer, AC, HT, RIG, Repeater	63	46.057.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan komputer, printer, AC, HT, RIG, Repeater	63	46.120.000	
e	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan gedung kantor bertingkat	400	25.872.000	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol pp Kota Salatiga	pemeliharaan gedung kantor bertingkat	400	30.000.000	
2	**PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100**	**1.040.140.000**	**PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100**	**1.226.104.600**	
			Presentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	**99**				**Presentase Penegakan Perda dan Per Ka Da**	**100**		
A	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**100**	**864.100.000**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum**	**100**	**1.041.104.600**	

a	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Terlaksana operasi BKC Ilegal bersama BC	10	99.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Terlaksana operasi BKC Ilegal bersama BC	10	99.000.000	
b	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol pp Kota Salatiga	Pemberdayaan linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, latsar linmas, lomba linmas	8	515.100.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol pp Kota Salatiga	Pemberdayaa n linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, latsar linmas, lomba linmas, insentif linmas	8	550.000.000	
c	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol pp Kota Salatiga	operasi PKL, PGOT, pengamanan hari besar, pengamanan INATARU, patroli pengendalian pelanggaran trantibum, penertiban APK, pengamanan Pemilu	8	250.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Satpol pp Kota Salatiga	operasi PKL, PGOT, pengamanan hari besar, pengamanan INATARU, patroli pengendalian pelanggaran trantibum, penertiban APK, pengamanan Pemilu	10	392.104.600	

B	**Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**166.040.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**100**	**175.000.000**	
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah penduduk yang memperoleh sosialisasi PERDA	4	41.040.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah penduduk yang memperoleh sosialisasi PERDA	4	50.000.000	
b	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	10	75.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	10	75.000.000	
c	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	2	50.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	2	50.000.000	
C	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Terbentuknya Sekretariat PPNS**	**2**	10.000.000	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Terbentukny a Sekretariat PPNS**	**2**	**10.000.000**	
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol pp Kota Salatiga	Rapat tim sekretariat PPNS dan Pembinaan PPNS	2	10.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol pp Kota Salatiga	Rapat tim sekretariat PPNS dan Pembinaan PPNS	2	10.000.000	

3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Satpol pp Kota Salatiga	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, ,	70	216.812.800	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN	Satpol pp Kota Salatiga	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	70	256.250.000	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100					100		
			Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	15					15		

A	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran**	**15**	**191.812.800**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran**	**15**	**231.250.000**	
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Tingkat Waktu Tanggap (respon time) daerah layanan wilyah kebakaran	30	106.092.800	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol pp Kota Salatiga	Tingkat Waktu Tanggap (respon time) daerah layanan wilyah kebakaran	30	130.000.000	
b	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	50	19.720.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	50	25.000.000	

c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian perlengkapan petugas pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran	5	48.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol pp Kota Salatiga	Pembelian perlengkapan petugas pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran	5	48.000.000	
d	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas damka	2	16.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas damka	2	24.210.000	
e	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1	2.000.000	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2	4.040.000	

B	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**2**	**25.000.000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**5**	**25.000.000**	
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2	25.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5	25.000.000	

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan tahunan Kota Salatiga selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsur masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok usaha dan DPRD. Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2026, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentigan. Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut diatas tidak ada usulan secara khusus yang di tujukan kepada Satpol PP Kota Salatiga, umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis sehingga tahun 2026 Satpol PP Kota Salatiga tetapi walaupun tidak ada kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat di Satpol PP Kota Salatiga tetap ada kegiatan yang bersumber dari masyarakat yang masuk dalam isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja yaitu "Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial"

Penentuan Isu-isu strategis didasarkan pada perkembangan situasi kondisi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah, peningkatan ketentraman dan ketertibanserta pelayanan pada masyarakat dapat dilihat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penegakan Perda dan Perwali dikarenakan Sekretariat PPNS belum terbentuk walaupun Perwali sudah ada, Kurangnya koordinasi Implikasi Sinkronisasi Simplikasi (KISS) anggota yang telah mengikuti diklat PPNS, dan Belum optimalnya dukungan stakeholder dan penyangga persepsi OPD.
2. Belum Optimalnya Peran Anggota Satlinmas karena tidak regenerasi anggota satlinmas khususnya perempuan.
3. Pembinaan SDM Satpol dikarenakan 80% anggota Satpol PP merupakan Non PNS.

4. Pengelolaan Damkar disebabkan sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan SOP dan terbatasnya personil damkar.

TABEL T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Satpol PP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol pp Kota Salatiga	Persentase penegakan perda dan perkada	100	
A	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Satpol pp Kota Salatiga	Prosentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
a	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol pp Kota Salatiga	Pemberdayaan linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, lomba linmas, insentif linmas	8	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dan berpedoman pada :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2024 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025–2045;
4. Recana strategis satuan polisi pamong praja Tahun 2025 – 2029.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terpadu dan berkesinambungan melalui penelaahan isu strategis rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Didalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita.

Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga pada Tahun 2026 mendukung agenda kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu supremasi hukum, stabilitas dan ketertiban umum, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, membatu Wali Kota dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

Arah pembangunan daerah Kota Salatiga sesuai Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: "Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia, selaras dengan RPJMN dan RPJMD provinsi Jawa Tengah.

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai di masa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan mengakibatkan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tujuan yang ingin dicapai Satpol PP Kota Salatiga selama tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 meliputi adalah **Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan**.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Satpol PP Kota Salatiga yaitu **Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif**.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana tabel berikut

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Target Capaian				Kondisi Akhir RPD	Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
		Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Rencana kerja tahun 2026 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026. Pada prinsipnya program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program, 12 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 11.783.775.000,00 yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

TABEL T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun (rencana/n) dan Prakiraan Maju Tahun (n+1)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**88**	**10.526.822.200**	**APBD**		**88**	**10.219.807.791**
01	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**6.807.000**	**APBD**		**100**	**35.000.000**
01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, Renja, LKPJ, LPPD, PPRG dan Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja	Satpol pp Kota Salatiga	7	6.807.000	APBD		7	15.000.000
01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Angka Kredit	Satpol pp Kota Salatiga	0	0	APBD		0	10.000.000
01	2	01	09	Pelaksanaan, Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya pengumpulan data ewalidata	Satpol pp Kota Salatiga	0	0	APBD		1	5.000.000
01	2	01	08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata	Satpol pp Kota Salatiga	0	0	APBD		1	5.000.000
01	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**9.275.614.400**	**APBD**		**100**	**8.940.689.791**

01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Satpol pp Kota Salatiga	48	6.347.436.964	**APBD**		48	5.787.277.044
01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium PPK dan Bendahara Pengeluaran	Satpol pp Kota Salatiga	12	2.928.177.436	APBD		12	3.153.412.747
01	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**35.400.000**	**APBD**		**100**	**42.000.000**
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi kendaraan dinas	Satpol pp Kota Salatiga	7	35.400.000	**APBD**		7	42.000.000
01	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**329.876.000**	**APBD**		**100**	**299.904.000**
01	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ekstra fooding PNS dan THL	Satpol pp Kota Salatiga	140	295.680.000	**APBD**		140	299.904.000
01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembelian Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	Satpol pp Kota Salatiga	0	0			0	0
01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai	Satpol pp Kota Salatiga	140	218.800.000	APBD		0	0
01	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**180.748.000**	**APBD**		**100**	**181.280.000**
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian komponen listrik dan penerangan kantor	Satpol pp Kota Salatiga	1	5.000.000	APBD		1	5.000.000

01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian perabot kantor, alat dan bahan kebersihan	Satpol pp Kota Salatiga	1	15.000.000	APBD		1	15.000.000
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembelian ATK, kertas dan cover	Satpol pp Kota Salatiga	1	30.000.000	APBD		1	30.000.000
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembelian barang cetakan dan fotokopi	Satpol pp Kota Salatiga	1	15.000.000	APBD		15	15.000.000
01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	langgaran koran	Satpol pp Kota Salatiga	2	2.280.000	APBD		2	2.280.000
01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	pembelian makan minum tamu	Satpol pp Kota Salatiga	12	24.000.000	APBD		12	24.000.000
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas luar daerah dan snack rapa	Satpol pp Kota Salatiga	12	89.468.000	APBD		12	90.000.000
01	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**						
01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pembelian kendaran dinas jabatan	Satpol pp Kota Salatiga						
01	2	07	02	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pembelian kendaran dinas operasional	Satpol pp Kota Salatiga						
01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Pembelian kursi dan meja kerja	Satpol pp Kota Salatiga						

01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian komputer, printer, HT, RIG	Satpol pp Kota Salatiga					
01	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**65.304.000**	**APBD**		**100**	**65.304.000**
01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembelian Meterai dan perangko	Satpol pp Kota Salatiga	1	3.304.000	**APBD**		1	3.304.000
01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan telepon, air dan listrik	Satpol pp Kota Salatiga	3	50.000.000	**APBD**		3	50.000.000
01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya reapeter dan chainsaw	Satpol pp Kota Salatiga	12	12.000.000	**APBD**		12	12.000.000
01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium dan iuran BPJS bagi honorer dan THL	Satpol pp Kota Salatiga	0	-	**APBD**		0	-
01	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**633.072.800**	**APBD**		**100**	**655.630.000**
01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	Satpol pp Kota Salatiga	31	150.000.000	**APBD**		31	150.000.000
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional dan lapangan	Satpol pp Kota Salatiga	17	411.143.200	**APBD**		17	425.630.000

01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharan kursi dan meja kantor	Satpol pp Kota Salatiga	0		**APBD**		0	
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan komputer, printer, AC, HT, RIG, Repeater	Satpol pp Kota Salatiga	63	46.057.600	**APBD**		63	50.000.000
01	2	09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor bertingkat	Satpol pp Kota Salatiga	1	25.872.000	**APBD**		1	30.000.000
02				**PROGRAM PENINGKATA N KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100 100**	**1.040.140.000**	**APBD**		**100**	**1.042.523.968**
02	**2**	**01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a**	**Prosentase Patroli Siaga Ketertiban Umum**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**864.100.000**	**APBD**		**100**	**852.523.968**
02	2	01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	operasi PKL, PGOT, pengamanan hari besar, pengamanan INATARU, patroli pengendalian pelanggaran trantibum, penertiban APK, pengamanan Pemilu	Satpol pp Kota Salatiga	10	99.000.000	**APBD**		10	-
02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan linmas dalam patroli wilayah, Pelatihan linmas jambore linmas, gelar pasukan linmas, upacara hut linmas, latsar linmas, lomba linmas	Satpol pp Kota Salatiga	8	515.100.000	**APBD**		8	546.610.000
02	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kebupaten/Kota	Terlaksana operasi BKC Ilegal bersama BC	Satpol pp Kota Salatiga	8	250.000.000	**APBD**		8	305.913.968

02	**2**	**02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota**	**Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**100**	**166.040.000**	**APBD**		**100**	**180.000.000**
02	2	02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penduduk yang memperoleh sosialisasi PERDA	Satpol pp Kota Salatiga	240	41.040.000	**APBD**		240	55.000.000
02	2	02	11	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	Satpol pp Kota Salatiga	16	75.000.000	**APBD**		16	75.000.000
02	2	02	12	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi ketertiban kota non yustisi	Satpol pp Kota Salatiga	2	50.000.000	**APBD**		2	50.000.000
02	**2**	**03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Terbentuknya Sekretariat PPNS**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**2**	**10.000.000**	**APBD**		**2**	**10.000.000**
02	2	03	06	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rapat tim sekretariat PPNS dan Pembinaan PPNS	Satpol pp Kota Salatiga	2	50.000.000	APBD		2	50.000.000
04				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMAT AN KEBAKARAN DAN PENYELAMAT AN NON KEBAKARAN**	**Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**70 15 100**	**216.812.800**	**APBD**		**70 15 100**	**218.904.091**
04	**2**	**01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**1**	**191.812.800**	**APBD**		**15**	**193.904.091**

04	2	01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (respon time) daerah layanan wilyah kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	30	106.092.800	APBD		30	135.000.000
04	2	01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	1	19.720.000	APBD		50	25.000.000
04	2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pembelian perlengkapan petugas pemadam kebakaran dan kendaraan pemadam kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	15	48.000.000	APBD			33.904.091
04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	pelatihan peningkatan kapasitas SDM petugas damka	Satpol pp Kota Salatiga	2	16.000.000	APBD		0	-
04	2	01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	1	2.000.000	APBD			
04	**2**	**02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran**	**Satpol pp Kota Salatiga**	**1**	**25.000.000**	**APBD**		**2**	**25.000.000**
04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Satpol pp Kota Salatiga	5	25.000.000	APBD		2	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026, mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026 dan disesuaikan dengan jumlah dana/anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 berjumlah 3 (tiga) program, terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.783.775.000 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Rumusan Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						11.783.775.000,00							10.460.598.900,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.783.775.000,00							10.460.598.900,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						11.783.775.000,00							10.460.598.900,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.526.822.200,00						-	8.815.598.900,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun 100 %	6.807.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	6.807.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* *Cakupan Adminidtrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			1 Tahun 1 Tahun 100 %	9.275.614.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	7.304.138.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	6.347.436.964,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		7.283.978.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.928.177.436,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		20.160.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun 100 %	35.400.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	35.400.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	-			1 Tahun 1 Tahun	329.876.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	345.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				140 Unit	295.680.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		295.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	34.196.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan* *Tersedianya Bahan Logistik Kantor* *Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* *Tersedianya Peralatan Rumah Tangga* *Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* *Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah*	-			100 % 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	180.748.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	197.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.280.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		2.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	24.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	89.468.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* *Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor* *Tersdianya Jasa Surat Menyurat* *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 %	65.304.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	65.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.304.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* *Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* *Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* *Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 %	633.072.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga	-	846.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	150.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	411.143.200,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		560.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	46.057.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		56.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.872.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Satpol PP Kota Salatiga		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						1.040.140.000,00						-	1.340.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum* *Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* *Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	-				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	864.100.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga	-	950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	**Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota**														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	99.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	515.100.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				8 laporan	250.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* *Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* *Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah* *Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	-			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 %	166.040.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga	-	340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	41.040.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				2 Laporan	75.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8 Laporan	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil* *Terbentuknya Sekretariat PPNS*	-			1 Tahun 2 kegiatan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	PPNS Kota Salatiga	-	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	PPNS Kota Salatiga		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						216.812.800,00						-	305.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran* *Terlaksananya Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran* *Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota* *Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran* *Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Kebakaran* *Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	-			1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 % 1 Paket	191.812.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga	-	280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				30 Laporan	106.092.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				50 Dokumen	19.720.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				25 Orang	16.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	48.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Terlaksananya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran* *Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	-			1 Tahun 5 kegiatan	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga	-	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				5 Dokumen	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negaradan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 13 Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Salatiga		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**11.783.775.000,00**							**10.460.598.900,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Satpol PP Kota Salatiga di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP Kota Salatiga yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Satpol PP Kota Salatiga baik dalam kerangka regulasi maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 antara lain :

1) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Satpol PP pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian misi Pemerintah Kota Salatiga;
2) Penyusunan Renja Satpol PP ini berpedoman pada Renstra Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2025-2029, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025-2029 telah termuat dalam Renja 2026.

b. Kaidah Pelaksanaan

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka panjang (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkret dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Renja merupakan dasar dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD dan sebagai dasar penilaian kinerja SKPD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam penyusunan Renja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2022 telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan beberapa progam, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disesuaikan.
2) Rencana Kerja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Salatiga maupun DBHCHT harus memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada.
3) Renja Satpol PP ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026;
4) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Salatiga. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Salatiga;
5) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Satpol PP Kota Salatiga Tahun 2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Kota Salatiga sebagai strategi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun rencana tindak lanjut Satpol PP Kota Salatiga dalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mempertahankan kondisi sarpras agar dalam keadaan selalu siap untuk digunakan;
2) Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3) Peningkatan kualitas disiplin aparatur;
4) Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing personel;
5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
6) Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas;
7) Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat;
8) Peningkatan kerjasama dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
9) Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertib dan tentram;
10) Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di masyarakat;
11) Peningkatan kualitas dan kuantitas kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk dijadikan dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah dan sebagai panduan dalam pelaksananaan kegiatan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum bagi para aparatur pelaksana. Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Tahun 2026 ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

WALI KOTA SALATIGA

ROBBY HERNAWAN

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326842
Faks (0298) 321398 Situs https://satpolpp.salatiga.go.id/
Surat elektronik satpolpp@salatiga.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA
NOMOR : 900/003

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), maka perlu dibentuk tim;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

12. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 125 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
b. melakukan pembahasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;
e. Melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

SATPOL PP

KUSUMO AJI

Tembusan :
1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

Lampiran : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota salatiga
Nomor : 900/003
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

No	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala Satpol PP	Pengarah
2.	Sekretaris Satpol PP	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Penegakan	Anggota
6.	Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perwali	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	Anggota
8.	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Linmas	Anggota
9.	Kepala Seksi Ketertiban Umum Operasional dan Pengendalian	Anggota
10.	Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi	Anggota

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,



KUSUMO AJI

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal 25 bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil sebagai berikut :

Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan;
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
5. Penutup.

Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;

Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga	Koordinator Tim Verifikasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA Kota Salatiga
YAYAT NURHAYAT, AP, M. Si	AZIZ MUSLIM, SE, MM
NIP. 19740416 199311 1 001	NIP. 197402172005011005

Lampiran 1 :
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD
Tahun 2026

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Perlu perbaikan	Sudah diperbaiki
9.	Perumusan kegiatan prioritas.		✓	Belum ada	Sudah ditambahkain
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Belum ada	Sudah ditambahkan
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	Baru akan disahkan setelah ini	

Lampiran 2 :
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD
Tahun 2026

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sudah mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 – 2029
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Perumusan rencana program dan kegiatan yang mendukung prioritas kota, provinsi dan nasional belum ada (sudah di TL)

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD		✓	- RPD 23-26 dihapus saja diganti RPJMD 25-29 - Tupoksi dan sotk tidak diperlukan jadi dihapus saja **(sudah di TL)**
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.		✓	- Perbaiki urutan penulisan dasar hukum sesuai ketentuan yang berlaku Tambahkan perda no 7/2025 tentang RPJMD Kota Salatiga **(sudah di TL)**
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		Tahun masih 2023, untuk disesuaikan Evaluasi tahun 2024 bukan 2023 **(sudah di TL)**
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu	1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
	Strategis PD	terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program perioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiaran priotas tahun n.			
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31		✓	Bandingkan dengan RKPD 2026, namun hasil analisis kebutuhan mengacu pada renstra 25-29 Perbaiki tabel T-C.31, kolom Renstra diganti RKPD 2026 **(sudah di TL)**
II.5	Penelaahan Usalan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;		✓	Perbaiki Tabel T-C.32, tabel ini hanya memuat program/kegiatan/ sub kegiatan yang merupakan usulan Masyarakat yang berasal dari Musrenbang, Pokir dan Hibah

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		Tabel T-C.32			**(sudah di TL)**
III.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.		✓	- Tambahkan penelaahan terhadap kebijakan provinsi jawa Tengah (arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi) yang berkaitan dengan tupoksi PD **(sudah di TL)**
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029 Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;	✓		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33			
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.	✓		